



## Peran Pendapatan Daerah Terhadap Pasar Cakke Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Enrekang

Karina Arfany Arfah<sup>1</sup>, Risfaisal<sup>2</sup> Fiska Pebrianti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak

Email : [karina.arfany@gmail.com](mailto:karina.arfany@gmail.com)

<sup>2</sup>Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : [risfaisal@unismuh.com](mailto:risfaisal@unismuh.com)

<sup>2</sup>Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : [fiskapebrianti22@gmail.com](mailto:fiskapebrianti22@gmail.com)

---

**Abstract.** *This study aims to determine: 1) To determine the Role of Regional Income on the Cakke Market in Community Economic Growth during the Covid-19 pandemic, 2) to determine the obstacles in the implementation of collecting market fees during Covid-19. This type of research is qualitative using the Study approach. The case with the determination of informants through purposive sampling technique. Data collection techniques used are: Observation, Interview, Documentation. The data obtained were analyzed using descriptive qualitative with the stages of reducing data, displaying data and drawing conclusions. Technique validity of data using triangulation methods or techniques. The results show that the increase in regional income has not been maximized because the target of receiving market fees has not been achieved even though the realization of market fees in Anggeraja District, Enrekang Regency has increased every year. This is due to various obstacles such as lack of market revitalization, intensive data collection on mandatory fees, unpaid tax payments by merchants for various reasons, the covid-19 pandemic and the weather so that the realization of market retribution receipts did not reach the target.*

**Keywords :** *the role of Increasing Revenue, constraints, Covid-19 Pandemic.*

---

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk Mengetahui Peran Pendapatan Daerah Terhadap Pasar Cakke Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat selama masa pandemi covid-19, 2) untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar selama covid-19. Jenis penelitian ini Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus dengan penentuan informan melalui teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Deskriptif Kualitatif dengan tahapan mereduksi data, mendisplay data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan *trianggulasi metode atau teknik*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peningkatan pendapatan daerah belum maksimal karena belum tercapainya target penerimaan retribusi pasar yang telah ditetapkan meskipun realisasi retribusi pasar di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti kurang revitalisasi pasar, intensifnya pendataan wajib retribusi, tunggakan pembayaran pajak oleh pedagang karena berbagai alasan, faktor adanya pandemi covid-19 dan cuaca sehingga realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target.

**Kata Kunci :** *Peran Pendapatan Daerah, Kendala, Pandemi Covid-19.*

---

## PENDAHULUAN

Dengan adanya pandemi covid-19 indonesia harus melakukan segala bidang aspek kehidupan, yang dimana pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk perbaikan pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan pembangunan, setiap daerah diberikan kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri atau yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri termasuk memaksimalkan pendapatan asli daerahnya, sehingga Pemerintah Daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut, secara mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya.

Fokus perhatian berkenaan dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada Nomor 23 tahun 2014 bahwa Pemerintah daerah memungkinkan untuk mengatur rumah tangganya. Dengan penepatan otonomi secara utuh pada daerah kabupaten. Sebagaimana konsekuensi daerah otonomi memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam membentuk dan menjalankan kebijakan menurut aspirasi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan prakarsa.

Pemberian otonomi kepada daerah maka memungkinkan daerah yang terkait untuk mengurus rumah tangganya untuk mengembangkan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan daya guna. penyelenggaraan pemerintahan yang efektif yaitu dapat merumuskan kebijakan dan menyampaikan kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat dan demokratis (dikontrol rakyat). Dalam konteks krisis pandemi covid-19 indonesia berdebat tentang mana yang harus diutamakan kesehatan ataukah ekonomi yang dimana ekonomi sebagai sesuatu yang sangat sempit terutama dengan pendapatan asli daerah, berbicara tentang ilmu perekonomian bahwa ekonomi diartikan sebagai sumber daya dalam artian luas pula seperti finalis alam, tenaga kerja dan sebagainya yang sifatnya terbatas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun alasan peneliti sehingga mengangkat judul penelitian ini karena peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana retribusi pasar dalam pendapatan asli daerah sebelum adanya covid-19 dan adanya covid-19, apakah pendapatan asli daerah normal seperti sebelumnya atau sebaliknya karena dimana sebelum adanya covid-19 pasar terbuka 2 kali seminggu dan dengan adanya covid-19 pasar hanya terbuka 1 kali dalam seminggu selama adanya covid-19.

## METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data sedangkan kualitatif yang memperoleh data dengan melakukan observasi wawancara dan dokumentasi yang ingin diungkapkan, mengembangkan, menafsirkan data, peristiwa kejadian dan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat sekarang, penelitian dengan menggunakan metode tersebut menitikberatkan pada observasi.

Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, pendekatan studi kasus dianggap paling tepat untuk digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan karena pendekatan studi kasus, dengan peneliti menjelaskan dan memahami objek yang diteliti secara khusus sebagai suatu kasus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Pendapatan Daerah Terhadap Pasar Cakke Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Selama Masa Pandemi Covid-19

Pada prinsipnya, retribusi pasar merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum yang turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur kemampuan kemandirian Pemerintah dalam membiayai mobilitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah harus memperhatikan efisiensi dan efektifitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU nomor 28 tahun 2009 mengenai retribusi pasar ini adalah pungutan di daerah yakni sebagai pembayaran atas perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang secara pribadi atau juga badan yang terlibat atas suatu pembayaran terhadap penggunaan baik jasa atau juga perizinan pemerintah daerah.

Pengembangan pendapatan asli daerah tersebut tidak lepas dari mekanisme sistem pemerintah daerah dengan cara kerja sama antar dewan perwakilan dan kepala daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing. Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, sub sektor retribusi pasar merupakan bagian dari sumber penerimaan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup berarti karena dimana kontribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah yang juga dapat menentukan arah perkembangan dan pembangunan suatu daerah kedepannya.

#### a. Perencanaan Yang Diterapkan Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Enrekang

Perencanaan yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan berdasarkan hasil wawancara yaitu penentuan target penerimaan retribusi pasar serta Pendataan wajib retribusi. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi cakke maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Dinas Perdagangan. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Penerimaan retribusi pasar yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Perdagangan yang ada di kec. Anggeraja senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuan organisasi. Penentuan target penerimaan retribusi serta Pendataan wajib retribusi Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi cakke kecamatan Anggeraja maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Dinas Perdagangan. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Peran yang dilakukan yaitu penentuan target Retribusi, pelayanan pasar cakke Kabupaten Enrekang yang memiliki potensi cukup tinggi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pencapaian target yang ditentukan. Dapat kita lihat bahwa dari data realisasi pendapatan retribusi pasar pada tahun 2018-2020 yaitu sebagai berikut:

**Table 1.7 Target dan Realisasi Retribusi Pasar pada tahun 2018-2020**

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2018	Rp 1.000.000.000	Rp 616.964.000	61,70

2	2019	Rp 1.000.000.000	Rp 821.670.000	82,17
3	2020	Rp 1.000.000.000	Rp 487.385.000	48,74

Sumber: Dinas Perdagangan dan perindustrian Kab.Enrekang

Berdasarkan persentase target dan Realisasi di atas selama 3 tahun akhir ini bahwa seperti yang kita ketahui retribusi pasar tidak ada yang mencapai target. Target retribusi pasar pertahun dari tahun 2018-2020 adalah Rp. 1.000.000.000 dan pencapaian target yang tertinggi yaitu pada tahun 2019 tahun lalu sebesar Rp. 821.670.000 atau 82,17 % dan pencapaian target terendah pada tahun 2020 Rp. 487.485.000 atau 48,74 dimana tahun ini mengalami penurunan drastis.

#### **b. Pengorganisasian Yang Diterapkan Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Enrekang**

Dalam suatu organisasi terdapat struktur organisasi dengan tujuan untuk membagi pekerjaan dengan melihat tugas dan fungsi masing-masing bagian. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT pasar) tentang Dinas Perdagangan maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas tersebut perlu ditindaklanjuti dengan uraian tugas. Dalam rangka menjalankan Peraturan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Pengorganisasian pada Dinas Perdagangan yaitu mengenai sumber daya manusia. Suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerja dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dari jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar diketahui dari Kepala Bina Pasar Dinas Perdagangan.

#### **c. Pelaksanaan Pemungutan Yang Diterapkan Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Enrekang**

Retribusi pasar dipungut oleh juru tagih yang ada di setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasar dengan menggunakan alat bukti pembayaran berupa karcis yang telah tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Dalam hal pembayaran, pedagang yang tidak membayar retribusi tepat pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari keseluruhan jumlah retribusi yang harus dibayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis pasar yang dapat dikenakan retribusi pelayanan pasar meliputi pasar umum.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar cakke Kab.enrekang, retribusi pasar dikenakan kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Fasilitas pasar yang dikenakan retribusi pasar adalah berupa los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Pemungutan retribusi pasar baik itu kios maupun los telah diatur dalam Peraturan.

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dengan tarif sebagai berikut :

**Table 1.8 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar**

No	Ukuran tempat pedagang	Tarif (Rp)	Frekuensi Waktu
1	4m x 4m (16m <sup>2</sup> atau lebih)	4.000	Per minggu
2	3m x 4m (12m <sup>2</sup> sampai dengan 15m <sup>2</sup> )	3.000	Per minggu
3	3m x 3m (9m <sup>2</sup> atau kurang)	2.000	Per minggu
4	1m x 1m (Insidentil)	1.000	Per minggu

#### **d. Pengawasan Yang Diterapkan Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Enrekang**

Pengelolaan pemungutan yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan yaitu pengawasan. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar merupakan hal yang sangat penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi pasar bisa diminimalisir.

Demikian dalam pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk menghindari dan menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin biasa terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi pasar tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar. Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi pasar dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam pengawasan penerimaan retribusi pasar dilakukan dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala UPT (unit pelaksana teknis) dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

#### **2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan pajak Pasar Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat selama Masa Pandemi Covid-19.**

Pendapatan daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial bagi suatu daerah. Hasil dari pungutan retribusi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kelangsungan kehidupan pemerintahan daerah yang bersangkutan, terutama untuk menandai kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan.

Jika dilihat dari aktivitas yang terjadi di pasar cakke yang seakan akan tidak pernah mengalami kendala, secara tidak langsung dapat diperkirakan begitu besarnya potensi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, serta pengawasan terhadap pemungutan retribusi pasar itu sendiri, maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan target yang ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang yaitu kesalahan sistem pengelolaan penerimaan retribusi pasar, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kurangnya petugas serta kesadaran wajib retribusi. kecenderungan tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi pasar sesuai target dipengaruhi berbagai faktor diantaranya menurunnya kinerja SDM, dalam menentukan tarif retribusi, keterlibatan banyak pihak dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, masih rendahnya penegakan hukum di lingkungan Pasar Bambu Kuning, kurang memadainya fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, masih lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan para pedagang terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Namun retribusi pasar tidak selamanya berjalan baik apalagi di masa pandemi covid-19 ini antaranya:

#### **a. Penentuan Target Revitalisasi Pasar**

Retribusi pasar di terapkan oleh Dinas Perdagangan kabupaten Enrekang yaitu penentuan target penerimaan retribusi pasar cakke kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Pendataan wajib retribusi. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Dinas Perdagangan. Target penerimaan retribusi pasar merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi pasar, yaitu proses penentuan target penerimaan retribusi pasar yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

#### **b. Kurang Intensifnya Pendapatan Wajib pajak**

Dalam pemungutan retribusi pasar para kolektor selalu mendahulukan pedagang-pedagang yang ada di luar pasar, yang tidak memiliki tempat khusus di dalam pasar karena merekalah yang paling cepat pulangnya sehingga para kolektor melakukan pemungutan retribusi dengan mendahulukan pedagang yang tidak memiliki tempat khusus agar pedagang membayar retribusi sebelum mereka pulang dan disitulah tempat kendala yang dialami oleh para kolektor atau juruh tagih.

#### **c. Tunggakan Pembayaran Oleh Pedagang**

Perilaku pedagang di pasar cakke kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam menanggapi retribusi pasar bisa dikatakan tidak efektif dikarenakan sebagian para pedagang tidak mematuhi peraturan yang tercantum dalam surat ketetapan yang ditentukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan karena Selama masa pandemi covid-19 ini banyak Pedagang menghadapi masa sulit dalam perekonomian rumah tangganya untuk itu sebagian pedagang banyak yang mengeluh akibat barang dagangannya tidak laku sehingga mereka tidak membayar retribusi pasar.

### **KESIMPULAN**

Peran pendapatan daerah terhadap pasar cakke dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat selama masa pandemi covid-19. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian mengenai peran pendapatan daerah terhadap pasar cakke dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat selama masa pandemi covid-19 (studi kasus Kec.Anggeraja Kab.Enrekang ) peneliti dapat mengambil kesimpulan

bahwa dalam peningkatan pendapatan daerah belum maksimal karena belum tercapainya target penerimaan retribusi pasar yang telah ditetapkan meskipun realisasi retribusi pasar di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti kurang intensifnya pendataan wajib retribusi, revitalisasi pasar, tunggakan pembayaran retribusi oleh pedagang karena berbagai alasan, faktor adanya pandemi covid-19 dan cuaca sehingga realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target. Kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak pasar dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Dalam memungut pajak senantiasa bertindak kurang tegas kepada para wajib pajak. Hal ini dikarenakan petugas kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya, seperti masih ada sikap sungkan pada wajib pajak bila mereka mengeluh belum laku dagangannya atau belum bisa membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikuno, S., 2000, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta
- Brotodiharjo, R Santoso.2009. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama.
- Danim, Sudarwan. 2005, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Edisi Pertama.cetakan pertama.Jakarta: Bumi Aksara.*
- Drs.H. Nurdin, M.Pd. 2019. *Panduan penulisan Proposal dan Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Dun, William N, 2008, *Analisis Kebijakan publik, Yogyakarta : Gajah Mada University.*
- Daun, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, I. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktis .* Jakarta: Bumi Aksara
- Jones, Charles O.2013. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* Terjemahan Ricky Ismanto.Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Kaho,R, Joseph. 2007.*Keuangan Otonomi Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lirik , M.R., 2009. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program : Suatu Kajian Teoritis Praktis ).* Sukarta : Pustaka Citra
- Murtiani , S., Subroto, I,M.I & Kurniadi, D., 2016. *Sistem Informasi Retribusi Pedagang Pasar Kabupaten Semarang. Jurnal Transistor Elektro dan Informatika (TRANSISTOR EI,pp. 47-59.*
- Utomo, C.e.w. & Haryadi,M., 2016. *Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota.Jurnal Strategi dan Bisnis , pp. 159-176*
- Soetopo, H.B 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta.
- Suradinata, E. 2003. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Ramdhan
- Winarno, B., 2008. *Kebijakan public Teori & Proses*. Jakarta: PT BUKUKITA
- Winardi, 2006, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bandung Alumni
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.